

ANALISIS PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN POLITIK PENDIDIKAN

Cholisin

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

Bung Hatta, dalam *brosur* yang terbit pada tahun 1932: *Ke Arah Indonesia Merdeka*”, menyatakan: “pendidikan politik dilakukan supaya keinsyafan rakyat akan hak dan harga dirinya bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik hukum dan pemerintahan negeri bertambah luas. Pendidikan politik cara begini berguna supaya terdapat syarat-syarat untuk menimbulkan di Indonesia suatu pemerintahan negeri yang berdasar kerakyatan dan kebangsaan, suatu pemerintah yang bersandar kepada rakyat dan takluk kepada kemauan rakyat” (Miriam Budihardjo, eds., 1980:48).

PKN (*Civics training*) sebagai bagian pendidikan politik menurut James Coleman, akan menekankan bagaimana mewujudkan warga negara yang baik dalam arti mampu berpartisipasi dalam kehidupan politiknya atau kehidupan politik nasionalnya (*we call civic training that part of political education that emphasizes how a good citizen participates in political life of his or her nation*) (Prewitt & Dawson 1977:141).

Teori sosialisasi politik yang melihat pada level warga negara secara individual paling tidak dikenal *system theory dan hegemonic theory* (Prewitt & Dawson, 1977:17). Teori sistem dalam ilmu politik dikenalkan oleh Easton kemudian Easton dengan koleganya Jack Dennis mengaplikasikannya pada studi sosialisasi politik. Sosialisasi politik dianggap memainkan peranan utama dalam menjaga kestabilan politik memungkinkan sistem politik yang sama berlaku terus-menerus sehingga mencapai dan berada dalam suasana mapan dan mantap. Sosialisasi politik memungkinkan terjadinya apa yang disebut Almond, (1960), sebagai “*system maintenance*” (kemampuan sistem politik memelihara dan mempertahankan dirinya secara terus-menerus) atau apa yang disebut Easton dan Dennis sebagai “*system persistence*” (kemampuan bertahan suatu sistem politik sesara terus menerus meski pun

sambil mengalami perubahan-perubahan) (Prewitt & Dawson, 1977:17-23; Alfian, 1982:8).

Pola belajar politik atau sosialisasi politik menurut teori sistem diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik ideal yang ingin dibangun bangsanya. Bagi bangsa Indonesia sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi Pancasila, maka arah sosialisasi politik adalah pada sistem politik ini.

Jika pada teori sistem arah sosialisasi politik pada dukungan terus menerus (*diffuse support*) terhadap pemeliharaan dan pengembangan sistem politik nasional, maka menurut teori hegemonik sosialisasi politik; diarahkan dari kelompok kekuatan politik yang dominan kepada kelompok yang didominasi. Teori hegemonik ini berarti akan mengarahkan sosialisasi politik pada dukungan terhadap kekuatan politik tertentu, bukan pada dukungan sistem politik nasional. Oleh karena itu dapat saja pengembangan teori hegemonik dapat mengarahkan pada sosialisasi politik yang akan melahirkan sikap untuk membenci atau memusuhi pemerintah (*my enemy is government*) kalau ini dilakukan oleh kelompok oposan. Sebaliknya kalau digunakan oleh rezim yang sedang berkuasa tidak saja akan melahirkan pemerintahan yang otoriter tetapi juga akan melahirkan karakteristik penduduk sebagai “kaula” daripada sebagai “warga negara” yang memahami akan hak dan kewajibannya.

Notonagoro menyebut “pengembangan filosofi pendidikan nasional Pancasila dengan menggunakan pendekatan “*eklektis-inkorporasi*”. Eklektis ialah bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber (*sources*) dari satu tokoh atau lebih, atau dari satu aliran (teori) atau lebih. Inkorporasi ialah “*to include as apart*” atau “*to combine into a unifide whole*”. Pendekatan “eklektis-inkorporasi” ialah pengembangan dan pemerayaan filosofi pendidikan nasional Pancasila dari berbagai unsur filosofi/filosofi pendidikan asing asalkan sesuai atau tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa yang kita bangun (Dwi Siswoyo.2013. 112-113)

Sedangkan politik pendidikan atau kebijakan pendidikan menurut Tilaar “Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan bangsa secara keseluruhan” (Tilaar dan Nugroho,2012 : 268)

Dari konsep pendidikan politik, pemikiran pendidikan dan politik pendidikan atau kebijakan pendidikan di atas, dapat dinalisis sebagai berikut.

Pertama, bahwa pendidikan politik bagi suatu bangsa adalah terkait dengan sistem politik nasionalnya yaitu berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik nasional. Dalam konteks Indonesia adalah memelihara mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila.

Kedua, pendidikan politik merupakan salah satu isi atau bagian dari kebijakan pendidikan.

Ketiga, Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan yang acuannya adalah ideologi nasional termasuk di dalamnya adalah pemikiran pendidikan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia atau pemikiran pendidikan Pancasila.

Keempat, berdasarkan pada analisis 1 – 3 di atas, maka secara konseptual dapat dinyatakan bahwa pendidikan politik merupakan implementasi dari politik pendidikan yang mengacu kepada pemikiran pendidikan.

Refrensi:

Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant.2012. Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik, dalam Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 264 - 270

Dwi Siswoyo.2013. PANDANGAN BUNG KARNO TENTANG PANCASILA DAN PENDIDIKAN, *Cakrawala Pendidikan*, Februari 2013, Th. XXXII, No. 1, halaman 103 -115.

Prewitt, Kenneth, Dawson, Richard E., Dawson Karen 5.,1977, *Political Socialization*, Boston: Little Brown and Company.